



dppkb
Kabupaten Purwakarta

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA

Disusun Oleh
ANWAR IBROHIM





BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah serta penyalarsan pagu anggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer, maka Renja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

33. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 92);
41. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja PD Tahun 2024 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2024;
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
 - c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja PD Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Satuan Polisi Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11. Dinas Pangan dan Pertanian
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22. Dinas Perikanan dan Peternakan
23. Sekretariat Daerah
24. Sekretariat DPRD
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah
27. Badan Pendapatan Daerah
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29. Inspektorat
30. Kecamatan Jatiluhur
31. Kecamatan Sukasari

32. Kecamatan Maniis
33. Kecamatan Tegalwaru
34. Kecamatan Plered
35. Kecamatan Sukatani
36. Kecamatan Darangdan
37. Kecamatan Bojong
38. Kecamatan Wanayasa
39. Kecamatan Kiarapedes
40. Kecamatan Pasawahan
41. Kecamatan Pondoksalam
42. Kecamatan Purwakarta
43. Kecamatan Babakan Cikao
44. Kecamatan Campaka
45. Kecamatan Cibatu
46. Kecamatan Bungursari
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

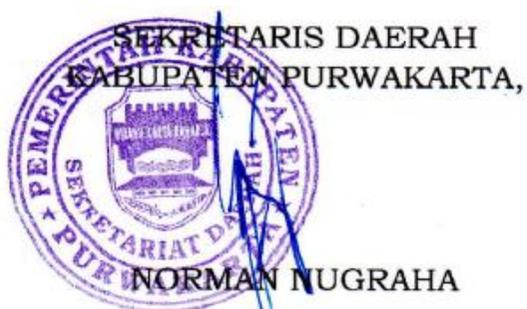
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,



Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 14 Agustus 2024





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Purnawarman Barat Nomor : 5/9, Sindangkasih, Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Kode Pos 41112

Telpon: (0264) 201006, Faximile : (0264) 201006

Laman : //dppkb.purwaktakab.go.id, Pos e-l : dppkb.purwakarta@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 126 / 03 . 01 Kep. DPPKB / 2024

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA (P-RENJA) Tahun 2024
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA

+

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah tahunan, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968, Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLN

- 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLN 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 200 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional Khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLN Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLN Nomor 4421).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Teknis
 11. Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen
 12. Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 13. Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021, tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta (RPD) 2024-2026.

14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 60 Tahun 2022 Tentang perubahan Rencana kerja Perangkat daerah tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta menjadi pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Purwakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal _____ 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PURWAKARTA**



H.YAYAT HIDAYAT.S.Sos
NIP. 19700215199703 1 009

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Laporan Perubahan Rencana Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis Kinerja dan sebagai panduan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024, mengacu kepada RPD Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024-2026 yang merupakan penjabaran program pembangunan daerah khususnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta, Sehingga tahapan-tahapan pembangunan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi Remaja, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dari Pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran Secara efektif dan akuntabel.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyajian data maupun kegiatan.

Oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan masukan untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dapat tersusun secara optimal dan berkualitas.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak ,khususnya kepada anggota tim penyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini.mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, Kewenangan dan program serta kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024. ◀

Purwakarta, 2024

**Kepala,
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Purwakarta**



H.YAYATHUBAWA U.S.Sos
NIP.19700215199703 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1.1.LATAR BELAKANG.....	1
1.2.LANDASAN HUKUM.....	3
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4.SISTEM MATIKA PENULISAN.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN.....	8
2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DENGAN TRIWULAM II TAHUN BERJALAN.....	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
3.1.PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.....	17
BAB VI PENUTUP.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta yang disusun sebagai derivasi Renstra Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta. Renja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Renja Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Kegiatan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta dalam menghasilkan produk perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur serta aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan pusat) dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, adalah didasarkan atas :

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional khususnya pasal 7 ayat (2) bahwa Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.

3. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104,TLN Nomor 4421).
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana` Kabupaten Purwakarta.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
21. Peraturan Bupati pumuktahiran pemerintah Nomor 1010 tentang perubahan Renja PD tahun 2023);
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
23. Peraturan Bupati pumuktahiran pemerintah Nomor 1010 tentang perubahan Renja PD tahun 2024);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi program/kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

1. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024;
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP) Tahun 2024;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

2 BAB II.HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dengan Trwiulan

II Tahun 2024

Pelaksanaan RENJA Tahun 2024 sampai dengan triwulan II ini belum menunjukkan hasil tingkat capaian kinerja program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta tingkat penyerapan atau realisasi pagu anggarannya yang optimal. Realisasi capaian kinerja dan keuangan tersebut harus di evaluasi kembali agar pelaksanaan target capaian pembangunan dapat lebih optimal dan efektif serta efisien dalam pelaksanaannya. Selain itu juga pencapaian target realisasi kinerja pendapatan daerah harus dievaluasi kembali sampai triwulan II, guna menjamin ketersediaan pagu anggaran dan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan pembangunan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ada 3 (tiga) Urusan Yaitu Urusan Kesehatan Pengendalian Penduuduk dan keluarga Berencana. Hasil Laporan Realisasi Anggaran untuk Triwulan II Rp.7.071.209.182,- dari Total Rp.22.170.608.231,- Atau 31.89%

Pelaksanaan penyelenggaraan bidang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sejatinya dapat dilihat dari pencapaian target indikator program pada masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. Adapun hasil capaian kinerja program pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan II tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** jumlah Anggaran Rp.7.540.048.231,- pada triwulan II baru teralisasi sebesar 43.15% sebesar Rp. 3.253.966.251, -.
2. **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**, dari total Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 366.000.000,- pada triwulan II baru teralisasi sebesar 6.39% sebesar Rp.23.398.000,-
3. **PROGRAM KELUARGA BERENCANA**, dari total Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.8.643.660.000,- pada triwulan II baru teralisasi sebesar 30.96% sebesar Rp.2.676.777.931,-.
4. **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** dari total Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.5.620.900.000,- pada triwulan II baru teralisasi sebesar 27,6% sebesar Rp. 1.117.067.000,-.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) sesuai urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

TABEL 2.1

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN PURWAKARTA

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No	Kegiatan	Biaya		Persentase Realisasi		Hasil Yang dicapai	Keluaran		
		Rencana	Realisasi	Keuangan	Fisik		Indikator	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
-	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	220,000,000	31,622,000	14.37	63.85	Presentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	0 Organisasi
-	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	155,000,000	42,400,000	27.35	60.00	Presentase partisipasi kelompok tribina dan UPPKS dalam ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	0 Laporan
2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
-	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	4,838,400,000	4,354,560,000	90	90.00	Presentase partisipasi Kelompok tribina dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan	3000 Orang	0 Orang
	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		
-	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	250,000,000	237,387,000	94.95	88.08	Presentase partisipasi Kelompok tribina dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	0 Laporan

-	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300,000,000	0	0.00	0.00	Presentase partisipasi Kelompok tribina dan UPPKS dalam Ketahanan Keluarga dan pemberdayaan ekonomi Keluarga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1 Unit	0 Unit
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								
-	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	1,124,750,000	1,031,910,000	91.75	89.01	cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kampung	0 Kampung
-	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100,000,000	58,320,000	58.32	68.44	cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6 Organisasi	0 Organisasi
4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								
-	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	373,000,000	447,498,000	119.97	144.57	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	50,000,000	0	0.00	0.00	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	250 Laporan	0 Laporan
-	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3,720,050,000	2,056,376,000	55.28	77.10	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4445 Orang	0 Orang
-	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	108,900,000	109,650,000	100.69	112.90	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	74 Laporan	0 Laporan
5	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)								
-	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1,386,000,000	1,732,500,000	125	141.70	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	70 Laporan	0 Laporan

-	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/ PLKB	753,360,000	645,480,000	85.68	87.10	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1Organisasi	0Organisasi
-	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	300,000,000	393,750,000	131.25	127.50	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	500 Orang	0 Orang
6	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
-	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,000,000	143,667,972	143.67	143.21	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen
-	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	573,600,000	750,885,568	130.91	125.71	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	254,000,000	243,953,850	96.04	103.00	Cakupan pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Unit	0 Unit
7	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								
-	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	25,000,000	0	0.00	0.00	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	0 Dokumen

-	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60,000,000	7,500,000	12.5	20.00	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	0 Dokumen
-	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	126,000,000	63,878,000	50.7	59.50	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dan KIE	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	3 Laporan	0 Laporan
8	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								
-	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	57,658,000	57,644,000	99.98	100.00	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	0 Kegiatan
-	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	62,342,000	0	0.00	0.00	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	0 Kegiatan

-	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	25,000,000	800,000	3.2	20.00	Cakupan Kerjasama Penyelenggaraan pendidikan Formal ,Non Formal dan Informal yang Melakukan pendidikan kependudukan : Persentase Stakeholder /Mitra Kerja dan Masyarakat Diseluruh tingkat Wilayah yang mendapatkan Pembinaan Advokasi dn KIE	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68,000,000	32,322,700	47.53	62.02	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	114 Unit	0 Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,410,000	0	0.00	0.00	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	41 Unit	0 Unit
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	245,024,500	244,445,263	99.76	100.00	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,000,000	42,042,700	84.09	66.00	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0 Unit
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519,803,016	305,061,385	58.69	104.00	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112,585,700	33,122,237	29.42	58.90	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	6,000,000	200	200.00	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	252,297,000	251,807,000	99.81	100.00	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0 Unit
-	Pengadaan Mebel	8,895,000	8,850,000	99.49	99.00	Capaian SAKIP perangkat Daerah Presentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	0 Unit
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah								

-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	10,125,000	67.5	95.00	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	0 Laporan
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176,220,000	36,830,000	20.9	30.00	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,416,000	26,604,000	137.02	145.67	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130,619,989	89,045,500	68.17	71.05	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32,815,500	11,564,000	35.24	57.02	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	0 Paket
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,335,000	26,670,000	200	200.00	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0 Paket
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,575,000	7,140,000	56.78	54.53	Capaian SAKIP Perangkat Daerah ;Presentase pemenuhan penunjang pelayanan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0 Laporan
14	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,741,700	14,304,400	184.77	185.95	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,570,904,864	4,057,142,542	61.74	80.00	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	0 Orang
15	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18,989,800	10,465,800	55.11	40.00	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	0 Laporan
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,461,800	27,996,000	295.88	208.63	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0 Laporan
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,346,600	9,337,600	99.9	100.00	Capaian SAKIP Perangkat Daerah Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen
TOTAL		23,266,501,469	17,660,658,517	75.91	27.85				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan urusan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yang terdiri dari 4 (Empat) Program kegiatan dari total APBD Tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 23.558.014.956,-

Pada Usulan Rencana Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengusulkan rencana Perubahan anggaran menjadi Rp. 22.170.608.231,- dari total anggaran tersebut terdapat program program kegiatan yang harus dilaksanakan yang tidak tercover dalam anggaran perubahan. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.489.382.704	6.369.324.264	Rp6.020.646.564,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		1 Dokumen	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1 Dokumen	6.459.382.704	6.353.343.564	Rp6.012.904.864,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	DANA PERTIMBANGA N		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		12 Bulan	6.428.509.310
2	14	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dkumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000	15.980.700	Rp7.741.700,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		1 Laporan	15.980.700
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	12.750.000	Rp12.575.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		1 Dokumen	
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah	4 laporan	4 laporan	15.000.000	12.750.000	Rp12.575.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		4 laporan	12.750.000
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	345.000.000	329.885.859	Rp295.406.489,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		6 Fasilitasi	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Item	5 Item	25.000,000	35.480,000	Rp13.335.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		5 Item	35.480.000
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga	8 Item	8 Item	20,000,000	22,618,700	Rp32.815.500,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		8 Item	22.168.700
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan Logistik kantor	4 paket	4 paket	75,000,000	38.500.000	Rp88.619.989,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		4 paket	106.826.059
2	14	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	25.000.000	15,000,000	Rp19.416.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		2 Laporan	15.000.000
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100,000,000	111.461.100	Rp15.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		12 Bulan	111.461.100
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah			100.000.000	116.084.800	Rp126.220.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			

2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Unit	3 Unit	50.000.000	32.980.800	Rp8.895.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	3 Unit	32.980.800
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	3 unit	50,000,000	83.104.000	Rp252.297.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	3 unit	83.104.000
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan			403.751.803	541.571.784	Rp521.995.478,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	3.751.803	3.000.000	Rp3.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	1 Laporan	5.000.000
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	75,000,000	99,156,768	Rp109.592.462,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	12 laporan	100.000.000
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan Umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	325.000.000	439.415.016	Rp409.403.016,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	DANA PERTIMBANGAN		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		500.000.000
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			465,000,000	454,100,000	Rp390.434.500,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat		
2	14	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	50.000.000	50.000.000	Rp50.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	5 Unit	75.000.000
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114 Unit	114 Unit	65,000,000	79,200,000	Rp68.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	114 Unit	100.000.000
2	14	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	250,000,000	300,000,000	Rp245.024.500,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	2 Unit	200.000.000
2	14	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	36 Unit	36 Unit	50,000,000	24,900,000	Rp27.410.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	36 Unit	100.000.000

					Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										kesehatan Masyarakat			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				650.000.000	328.698.900	Rp366.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,				Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			357.200.000
2	14	02	2.01	02	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan pemerintah Daerah kabupaten /Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk				400.000.000	145.992.800	Rp145.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,				Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			
2	14	02	2.01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	25,000,000	Rp25.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	1 dokumen		25.000.000
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Saresehat Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Pelaksanaan Saresehat Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	53.001.000	Rp62.342.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	1 Laporan		75.000.000
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPB	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program KKBPB	1 laporan	1 laporan	200.000.000	67.991.800	Rp57.658.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	1 laporan		75.000.000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				250.000.000	182.706.100	Rp221.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			
2	14	02	2.02	03	Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Terlaksananya Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	25.000.000	Rp126.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		25.000.000
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sistem informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	3 Laporan	1 Laporan	50.000.000	75.506.100	Rp60.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	1 Laporan		75.000.000
2	14	02	2.02	13	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya pengelolaan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	82.200.000	Rp35.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	2 Dokumen		82.200.000
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				7.997.944.900	7.681.191.900	Rp8.643.660.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			7.732.621.000

2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				426.000.000	382.150.000	Rp877.600.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Prgram KKBPk sesuai kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	1 Kegiatan	1 Kegiatan	96.000.000	150.000.000	Rp100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	DAK Non Fisik –BOKB-KB		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	1 Kegiatan	150.000.000
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	Terlaksananya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk	2 Unit	1 Unit	200.000.000	152.500.000	Rp204.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	1 Unit	160.000.000
2	14	03	2.01	03	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Terlaksananya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk	9 balai penyuluh	9 balai penyuluh	125.000.000	79.650.000	Rp573.600.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	9 balai penyuluh	79.650.000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				2.600.000.000	2.149.393.000	Rp2.439.360.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPk Di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya pembinaan IMP dan program KKBPk di lini lapangan oleh PKB/PLKB	12 kali	12 kali	500.000.000	808.000.000	Rp753.360.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	12 kali	808.000.000
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPk untuk petugas Keluarga Penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 laporan	12 laporan	1.600.000.000	1.376.375.000	Rp1.386.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	12 laporan	1.500.000.000
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB	5 Kegiatan	5 Kegiatan	500.000.000	550.000.000	Rp300.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	5 Kegiatan	550.000.000

2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota				4.310.749.000	3.827.971.000	Rp4.101.950.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			
2	14	03	2.02	01	Pengendalian pendistribusian Alat dan Obat kontrasepsi dan Sarana penunjang Pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	105 faskes	105 faskes	47.250.000	96.900.000	Rp108.900.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	DAK NON FISIK BOKB-KB		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	105 faskes	96.900.000
2	14	03	2.02	03	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	Terlaksananya peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang MKJP	7 Jenis	7 Jenis	1.163.499.000	2.149.393.000	Rp3.720.050.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	7 Jenis	2.149.393.000
2	14	03	2.02	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Terlaksananya Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	500 Kasus	500 Kasus	100.000.000	100.000.000	Rp0,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	500 Kasus	100.000.000
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	300.000.000	620.000.000	Rp273.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	2 Kegiatan	500.000.000
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				661.195.900	736.695.900	Rp1.224.750.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			
2	14	03	2.04	11	Penguatan Peran serta Oragnisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	Terlaksananya peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja	6 Kegiatan	6 Kegiatan	74.695.900	209.695.900	Rp100.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kabupaten Purwakarta	6 Kegiatan	250.000.000

3	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBP di kampung KB	Terlaksananya pelaksanaan dan pengelolaan program KKBP di kampung KB	34 Kampung KB	34 Kampung KB	586.500.000	586.500.000	Rp1.124.750.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	DAK NON FISIK BOKB-KB		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat at Kabupaten Purwakarta	34 Kampung KB	527.000.000
3	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				6.231.905.000	6.345.126.100	Rp5.620.900.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			6.438.000.000
3	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				286.000.000	360.000.000	Rp5.338.400.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			
3	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 unit	20 unit	729.000.000	360.000.000	Rp300.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	DAK FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB REGULER KB		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat at Kabupaten Purwakarta	20 unit	360.000.000
3	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (NKN, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4 Laporan	4 Laporan	150.000.000	225.000.000	Rp200.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat at Kabupaten Purwakarta	4 Laporan	250.000.000
3	14	04	2.01	05	Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 orang	3340 orang	5.046.905.000	5.278.000.000	Rp4.838.400.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	DAK NON FISIK BOKB-KB		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat at Kabupaten Purwakarta	3340 orang	5.278.000.000
3	14	04	2.02	02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				286.000.000	482.126.100	Rp282.500.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,			Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat			

3	14	04	2.02	02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan	4 Laporan	4 Laporan	143.000.000	200.000.000	Rp62.500.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat at Kabupaten Purwakarta	4 Laporan	250.000.000
3	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan (BKB,BKR,BKL, PPPKS PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	3 Organisasi	3 Organisasi	143.000.000	282.126.100	Rp220.000.000,00	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan drajat kesehatan Masyarakat	Masyarakat at Kabupaten Purwakarta	3 Organisasi	300.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta 2024-2026. Rencana Kerja ini memuat hasil evaluasi triwulan II, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta.

Rencana Kerja ini disusun sebagai perwujudan perencanaan partisipatif, dengan pelibatan sebesar-besarnya peran masyarakat melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), diharapkan perencanaan ini dapat mencerminkan komitmen bersama antara aparatur dan seluruh stakeholder Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.

Dengan demikian pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian RPD Kabupaten Purwakarta 2024-2026 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Agustus 2024

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

H.YAYAT HIDAYAT,S.Sos
NIP . 19700215199703 1 009